



Rp170 Miliar DAK Fisik Gagal Salur

ALOKASI DANA TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA TA 2020 SE-KALBAR

1. Pemprov Kalbar : Rp3,82 triliun
2. Kabupaten Bengkayang : Rp976,4 miliar
3. Kabupaten Landak : Rp1,27 triliun
4. Kabupaten Kapuas Hulu : Rp1,64 triliun
5. Kabupaten Ketapang : Rp1,94 triliun
6. Kabupaten Mempawah : Rp878,2 miliar
7. Kabupaten Sambas : Rp1,55 triliun
8. Kabupaten Sanggau : Rp1,38 triliun
9. Kabupaten Sintang : Rp1,71 triliun
10. Kota Pontianak : Rp983,7 miliar
11. Kota Singkawang : Rp657,5 miliar
12. Kabupaten Sekadau : Rp837,4 miliar
13. Kabupaten Melawi : Rp981,6 miliar
14. Kabupaten Kayong-Utara : Rp730 miliar
15. Kabupaten Kubu Raya : Rp1,28 triliun

**TOTAL :
RP20,67
TRILIUN**

**Midji :
Rugi, Cari
Duitnya
Susah**

PONTIANAK - Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Edih Mulyadi memastikan ada Rp170 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat yang mengalami gagal salur atau tidak terserap di tahun ini. Sampai kemarin, baru 68 persen DAK Fisik yang terserap dari total sekitar Rp2,6 triliun alokasi ke Kalbar.

“Masih tahap dua, ada Rp170-an miliar yang gagal salur,” ungkapnya usai kegiatan penyerahan DIPA TA 2020 di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (19/11).

◆Ke Halaman 7 kolom 1

SUMBER: KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN (DJPB) KALBAR



Rp170 Miliar DAK Fisik Gagal Salur

Sambungan dari halaman 1

Ia mengungkapkan secara keseluruhan DAK fisik baru terserap sebesar 68 persen. Sisanya sekitar 32 persen belum bisa diprediksi apakah akan terealisasi semuanya atau tidak.

"Nah waktu yang tinggal sebulan ini sangat krusial. Saya tidak bisa prediksi, karena proses upload dokumen untuk tahap tiga dalam proses. Jadi kami tidak bisa menentukan secara pasti berapa (total) yang tidak terserap," terangnya.

Namun yang sudah bisa dipastikan di tahap kedua, setidaknya ada Rp170-an miliar yang gagal salur. Menurutnya, hal itu terjadi karena masalah yang san-

gat mendasar yakni terkait dengan perencanaan. Setelah mencermati masalah ini, ia menilai penting dilakukannya tinjauan atau analisis proses perencanaan oleh masing-masing satuan kerja.

"Ada suatu kegiatan yang ternyata pada saat pencairan pertama selesai, padahal perencanaannya untuk tiga tahap. Kalau tidak salah sampai Rp15 miliar. Jadi, Rp5 miliar selesai, yang Rp10 miliar tidak terserap, tidak digunakan," paparnya.

Masalah ini dikatakan menjadi salah satu perhatian DJPb Kalbar karena berdampak luas. Pertama, jika dana APBN atau APBD tidak diserap atau diimple-

mentasikan tentu akan berpengaruh pada perekonomian daerah. Soalnya dana dari negara itu merupakan alat untuk proses pembangunan.

Solusinya, DJPb terus menjalin komunikasi dengan seluruh instansi serta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan bahwa pihak terkait paham dengan persoalan. Kedua, ia menilai masalah ini terjadi karena ada prosedur baru di tahun 2019. DAK fisik harus melewati ulasan (review) oleh Inspektorat atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Faktanya, di beberapa daerah, proses ulasan oleh APIP cukup memakan waktu sehingga molor.

"Ada juga karena proses review ini baru, jadi belum dipahami secara baik oleh daerah. Ada APIP yang tidak hanya me-review, tetapi justru melakukan audit. Ini kan beda konsep antara review dengan audit. Jadi ini salah satu kendala," jelasnya.

Meski demikian, ia cukup bersyukur respon gubernur dan beberapa kepala daerah sudah sangat baik sehingga masalah ini bisa dicarikan solusi. "Beliau (gubernur) juga menyayangkan, itu rugi bagi daerah. Maka dari itu, kami terus jalin komunikasi," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyayangkan jika Rp170-an miliar DAK fisik tidak terserap. Menurutnya,

salah satu penyebabnya adalah proses perencanaan yang bersamaan di tahun berjalan dengan pengerjaan fisik. "Harusnya perencanaan itu satu tahun sebelumnya, sehingga ketika Januari (awal tahun) sudah bisa mulai tender," katanya.

Dalam hal ini ia mengajak dinas terkait khususnya PUPR dan Bappeda untuk mengubah pola pikir. Midji menilai, jajaran birokrasi di dua instansi tersebut kurang inovatif. "Sekarang ini menjabarkan visi misi kepala daerah, harusnya Bappeda konsultasi ke saya, apa mau

bapak, ini itu. Oke. Nah, yang prioritas yang mana, siapkan perencanaannya. Perencanaan harusnya satu tahun sebelumnya," tegas dia.

Saat perubahan anggaran yang lalu, Midji juga sudah meminta agar tender segera dilakukan. Namun, ada permasalahan lain secara aturan sehingga prosesnya memakan waktu cukup lama antara dua sampai tiga bulan. "Akhirnya tidak mengejar, terpaksa Januari, sama juga masalahnya. Itu yang harus diselesaikan. Oleh pusat juga itu

masalah," ucapnya.

Ke depan, orang nomor satu di Kalbar itu berharap harus ada percepatan agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Seperti tahun 2018 lalu, ia menyebut serapan anggaran di Kalbar sudah cukup tinggi yakni mencapai sekitar 98 persen.

"Tahun ini ya mungkin 93-95 persen itu sudah bagus. Penyerapan anggaran (itu) perhatikan betul, (apa) kendalanya koordinasikan. Terutama DAK fisik. Jangan sampai kembali lagi ke pusat, rugi, cari duitnya susah," tutupnya. (**bar**)